



TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

INTISARI

Oleh

Kaishar Ougest Teewant Beenain¹ dan Totok Dwi Diantoro²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui landasan hukum yang digunakan beserta dengan bentuk implementasi dari Program Kali Bersih oleh Pemerintah Kota Surabaya termasuk dengan peran serta masyarakat atas bentuk implementasi Program Kali Bersih yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tujuan meneliti kesesuaian fakta di lapangan atas upaya pelaksanaan Program Kali Bersih oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta peran dan dampak bagi masyarakat yang tinggal disekitar sungai dihubungkan dengan peraturan yang menjadi landasannya. Data primer penelitian diperoleh dari narasumber yang terkait di lokasi penelitian dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan serta bahan bacaan yang relevan. Data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan atas Program Kali Bersih yang menjadi instruksi secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya secara konkret tiap periode, namun masih belum didapati pengaturan terbaru pada tingkat daerah yang menjadi landasan pelaksanaan Program Kali Bersih di Kota Surabaya, sehingga Program Kali Bersih tidak terlaksana secara sistematis dan konsisten. Pemerintah Kota Surabaya telah melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa agenda pelaksanaan Program Kali Bersih dan mendapatkan bantuan secara langsung dan tidak langsung oleh LSM dan/atau Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Atas lemahnya pengaturan pada tingkat daerah tersebut menyebabkan berbagai kendala dan kekurangan yang didapati dalam upaya imlementasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Kata Kunci : *Tinjauan Hukum, Program Kali Bersih, Implementasi Program Kali Bersih*

¹ Mahasiswa Program Sarjana (S1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

ABSTRACT

By :

Kaishar Ougest Teewant Beenain³ and Totok Dwi Diantoro⁴

This legal research aims to analyze and find out the legal basis used along with the form of implementation of the Clean River Program by the Surabaya City Government, including community participation in the implementation of the Clean River Program implemented by the Surabaya City Government.

This research was conducted using empirical juridical research methods with the aim of examining the suitability of facts in the field regarding the implementation of the Clean River Program by the Surabaya City Government along with the role and impact on the people living around the river in relation to the regulations that form its basis. Primary research data were obtained from relevant informants at the research location and secondary data were obtained through literature studies and relevant reading materials. The data obtained is presented descriptively which is then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the sustainability of the Clean River Program which has become a national instruction based on the Decree of the Minister of Environment Number 35 of 1995 regarding the Clean River Program has been implemented by the Surabaya City Government concretely every period, but there is still no recent regulation at the regional level that became the basis for the implementation of the Clean River Program in the City of Surabaya, so that the Clean River Program was not carried out systematically and consistently. The Surabaya City Government has involved civil society in several implementation agendas of the Clean River Program and has received direct and indirect assistance from NGOs and/or organizations working in the environmental sector. The weak regulation at the regional level has caused various obstacles and deficiencies found in the implementation efforts by the Surabaya City Government.

KeyWords : *Legal Review, Clean River Program, clean river program implementation*

³ Mahasiswa Program Sarjana (S1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.